

ANALISIS KEBIJAKAN ARAB SAUDI TERKAIT BLOKADE QATAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF TWO LEVEL GAME THEORY

Muhammad Zulfikar Rakhmat¹, Ahmad Turmudzi²

^{1,2}Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

muhzulfikar@uii.ac.id

Abstrak

Dinamika hubungan Arab Saudi dan Qatar dari masa ke masa selalu menarik untuk dibahas. Hubungan antara keduanya sudah mulai mengalami kerenggangan sejak tahun 1990-an. Saat itu, Qatar dipimpin oleh pangeran Hamad bin Khalifa Al Thani yang pandangannya tentang masa depan Qatar berbeda dengan ayahnya yang pro terhadap Arab Saudi. Saat ini hubungan keduanya mulai renggang kembali, disebabkan oleh keberpihakan Qatar terhadap Iran dan organisasi *Ikhwanul Muslimin*. Merespon hal tersebut, Arab Saudi kemudian melakukan blokade terhadap Qatar pada sektor darat, laut dan udara yang mana fenomena ini sering disebut sebagai krisis Teluk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar tersebut melalui perspektif *Two Level Game Theory*. Dengan menggunakan teori di atas, penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi Arab Saudi dalam mengeluarkan kebijakan blokade terhadap Qatar. Dua faktor tersebut adalah faktor nasional dan faktor internasional. Faktor nasional meliputi keadaan domestik Kerajaan Arab Saudi yang mendorong negara itu untuk mengeluarkan kebijakan blokade tersebut. Sedangkan faktor internasional meliputi bagaimana keadaan di lingkup internasionalnya yang dalam hal ini adalah kawasan Timur Tengah yang membuat Arab Saudi harus mengeluarkan kebijakan tersebut, dalam tulisan ini dijelaskan bahwa hubungan Qatar dan Iran dan *Ikhwanul Muslimin*.

Kata Kunci : Arab Saudi, Qatar, Blokade, *Two Level Game*

Abstract

The dynamics of the relationship between Saudi Arabia and Qatar from time to time are always interesting to be discussed. The ties between the two, however, have begun to experience estrangement since the 1990s. At present, the relationship between the two is starting to drift apart again, due to Qatar's partiality towards Iran and the Muslim Brotherhood. Responding to this, Saudi Arabia then conducted a blockade on Qatar in the land, sea and air sectors which this phenomenon is often referred to as the Gulf crisis. This study aims to analyze Saudi Arabia's blockade policy towards Qatar through the perspective of *Two Level Game Theory*. Using the theory above, this study found that there are two factors that influenced Saudi

Arabia in issuing a blockade policy towards Qatar, which are national factors and international factors. National factors include the domestic circumstances of the Kingdom of Saudi Arabia which pushed the country to issue a blockade policy. While international factors include the situation in the Middle East, namely Qatar's foreign policy towards Iran and the Muslim Brotherhood.

Keywords: Saudi Arabia, Qatar, *Blockade*, *Two Level Game*

PENDAHULUAN

Arab Saudi dan Qatar merupakan kedua negara yang saling bertetangga antara satu dengan yang lainnya. Sebagai negara yang bertetangga keduanya tentu memiliki hubungan yang kuat, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Salah satu bukti kuat akan hubungan baik mereka adalah keikutsertaan kedua negara dalam GCC (*Gulf Cooperation Council*), sebuah organisasi yang dibentuk pada 1981 dimana anggotanya berasal dari negara-negara Teluk. Hubungan antara keduanya sangat baik pada tahun 1970-an, pada masa itu keduanya ibarat saudara yang tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, dimana Arab Saudi selalu membantu Qatar dalam menjalankan pemerintahannya yang saat itu dipimpin oleh Khalifa bin Hamad Al Thani, bahkan Arab Saudi sempat menjadi pelindung bagi pemerintahan Qatar secara *de Facto*. Namun, hubungan antar keduanya berubah drastis setelah Khalifa bin Hamad Al Thani yang menjabat sebagai emir dari tahun 1972-1995 menyerahkan kekuasaannya pada anak pertamanya yang juga merupakan putra mahkota dari Kerajaan Qatar yang bernama pangeran Hamad bin Khalifa Al-Thani pada tahun 1992. Pangeran ini memiliki pandangan yang berbeda dengan ayahnya terkait masa depan Qatar yang cenderung bertentangan dengan Arab Saudi (Cherkaoui, 2014). Dalam literatur lainnya disebutkan bahwa Hamad bin Khalifa Al-Thani telah melengserkan kekuasaan ayahnya sendiri, Khalifa bin Hamad Al Thani yang saat itu tengah berlibur di Jenewa pada tahun 1995 (Prastiwi, 2017).

Ketegangan politik antara Arab Saudi dan Qatar sudah berlangsung sejak pertengahan abad 20, saat itu perseteruan antara kedua negara terpusat pada sengketa perbatasan yang melibatkan beberapa negara Teluk lainnya, seperti

Bahrain dan Uni Emirat Arab. Sejak saat itu, sengketa perbatasan antara Arab Saudi dan Qatar terus berlangsung hingga kedua belah pihak menyepakati batas final mereka pada perundingan tahun 2008. Salah satu sengketa batas wilayah kedua negara yang juga melibatkan Uni Emirat Arab adalah sengketa atas wilayah Khawr al-Udayd. Wilayah ini dianggap strategis oleh Inggris untuk meneguhkan dominasinya di wilayah Teluk pasca kekuasaan Turki Usmani. Konflik antara keduanya semakin memanas setelah ditemukannya kandungan minyak dan gas di wilayah tersebut. Adapun keterkaitan antara sengketa wilayah Khawr al-Udayd yang diperebutkan oleh Arab Saudi dan Qatar dengan kandungan sumber daya alam yang ada di dalamnya dapat dilihat dari proyek pembangunan pipa minyak Dolphin yang melibatkan Qatar dan Abu Dhabi (UEA) serta pembangunan Causeway yang menghubungkan Qatar dengan Abu Dhabi yang melewati wilayah Khawr al-Udayd pada tahun 2006, dimana hal itu menuai kecaman serta protes keras dari Arab Saudi (Wardoyo, 2018).

Seiring berjalannya waktu, isu ketegangan politik antara Arab Saudi dan Qatar juga mengalami perubahan faktor. Jika sebelumnya isu konflik antar kedua negara dipicu oleh faktor sengketa perbatasan wilayah dan sumber daya alam, saat ini konflik antar keduanya lebih menjurus pada faktor *policy* atau kebijakan, lebih tepatnya kebijakan luar negeri Qatar yang sangat bertentangan dengan Arab Saudi. Salah satunya adalah penerimaan terhadap *Ikhwanul Muslimin* di negara tersebut. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa keberpihakan Qatar terhadap *Ikhwanul Muslimin* adalah hal yang nyata dilakukan oleh Qatar. Dapat dilihat bagaimana tokoh-tokoh *Ikhwanul Muslimin* dapat hidup dengan tenang di Qatar, salah satunya adalah Yusuf Qordhowi, seorang anggota *Ikhwanul Muslimin* yang berasal dari Mesir yang saat ini sudah memperoleh kewarganegaraan Qatar. Beliau merupakan seorang ulama Qatar sekaligus pendiri fakultas *Syari'ah* di *Qatar University* pada tahun 1961 dan sampai saat ini masih eksis, pada tahun 2008-2009, beliau hanya mengajar 257 mahasiswa yang kebanyakan berasal dari luar Qatar (Roberts, 2014). Selain keberpihakan terhadap *Ikhwanul Muslimin*, Qatar juga terlibat dalam peristiwa *Arab Springs*, dimana negara ini mendukung penuh gerakan revolusi yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah, khususnya di

Libya dan Suriah (Cahyani, 2019). Dalam rangka merespon kebijakan-kebijakan luar negeri Qatar yang dianggap telah melampaui batas tersebut, ArabSaudi dan beberapa negara lainnya yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (*Gulf Cooperation Council*) sepakat untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Akhirnya pada tanggal 5 Juni 2017, ArabSaudi bersama dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar (Cahyani, 2019, hal. 518).

Setelah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, ArabSaudi terus berupaya untuk menekan Qatar dengan kebijakan-kebijakan luar negerinya yang menyudutkan Qatar. Salah satu kebijakan luar negeri ArabSaudi yang diduga cukup merugikan Qatar adalah blokade. Kebijakan ArabSaudi ini kemudian diikuti oleh negara-negara tetangganya yang juga merupakan bagian dari *Quartet* atau anti-Qatar yang terdiri dari; Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir. Adapun bentuk dari kebijakan blokade Qatar tersebut adalah larangan bagi warga Qatar untuk menggunakan serta melintasi jalur darat, laut, serta udara dari dan ke sejumlah negara-negara tetangga, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, dan tentunya ArabSaudi. Tidak hanya lima negara itu saja yang melakukan blokade terhadap Qatar, Mauritius, Mauritania, Maladewa, dan Libya juga memberlakukan hal serupa terhadap negara tersebut. Kebijakan blokade ini tidak hanya berlaku di Qatar, blokade ini juga berimbas pada warga Qatar yang berada di luar negeri, seperti ArabSaudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, dimana mereka diminta untuk meninggalkan negara-negara tersebut dalam jangka waktu 14 hari sejak kebijakan tersebut diberlakukan. Tidak berhenti sampai disitu, ketiga negara tersebut bahkan melarang warga negara mereka untuk pergi ke Qatar (Widodo, 2019). Tindakan Arab Saudi tersebut kemudian menuai respon dari negara-negara kuat di dunia, seperti Amerika Serikat, China, hingga negara-negara di Eropa juga turut merespon kebijakan blokade ArabSaudi terhadap Qatar tersebut, mereka menyerukan kepada negara-negara anggota GCC agar krisis diplomatik Qatar segera diselesaikan melalui dialog yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Namun faktanya belum ada diantara negara-negara tersebut yang mau mengambil tindakan khusus untuk mewujudkan agar dialog ini dapat

terrealisasi. Hal ini diduga kuat karena mereka (negara-negara Barat) tersebut juga terlibat dalam persaingan bisnis Teluk bersama dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang merupakan dua hegemon di Timur Tengah (Kinninmont, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan blokade Arab Saudi ditinjau dari perspektif *Two Level Game Theory*.

Two Level Game Theory merupakan salah satu teori dalam ilmu hubungan internasional yang digagas oleh Robert D. Putnam. Teori ini berfungsi untuk menganalisis para aktor hubungan internasional dalam membuat sebuah kebijakan. Adapun definisi dari teori ini adalah metafora untuk interaksi tingkat domestik dan internasional. Teori ini beranggapan bahwa, dalam membuat sebuah kebijakan seorang aktor harus memperhatikan dua level utama yaitu level nasional dan level internasional. Pada level nasional, kelompok domestik akan menekan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan mereka, lalu politisi akan melihat hal ini sebagai peluang untuk mencari kekuatan dengan membangun koalisi bersama kelompok-kelompok tersebut. Sedangkan pada level internasional, pemerintah akan berupaya untuk memaksimalkan kemampuan mereka dalam rangka untuk memenuhi kepentingan domestik, sambil meminimalisir konsekuensi yang merugikan pihak asing. Kedua hal ini akan selalu menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan oleh aktor negara dan aktor hubungan internasional, tidak satupun diantara keduanya dapat diabaikan oleh pembuat kebijakan selama suatu negaraitu masih berada dalam ketergantungan atas negara lain (Putnam, 1988).

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba untuk menganalisis kebijakan Arab Saudi terkait blokade Qatar melalui dua level. Level pertama adalah memperhatikan bagaimana keadaan domestik di Arab Saudi yang membuatnya harus mengeluarkan kebijakan tersebut, pada level ini faktor domestik Arab Saudi yang dalam hal ini adalah Kerajaan Arab Saudi menjadi faktor utama yang mendorong negara itu untuk membuat kebijakan blokade terhadap Qatar. Sedangkan level kedua adalah memperhatikan bagaimana keadaan di lingkup internasionalnya, lebih tepatnya di kawasan Timur Tengah yang memancing pemerintah Arab Saudi untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Pada level ini,

faktor yang paling menentukan adalah aktor-aktor internasional di kawasan Timur Tengah yang kemudian mendorong ArabSaudi untuk mengeluarkan kebijakan blokade tersebut, salah satu contoh ringkas adalah hubungan antara Qatar dengan Iran yang notabene merupakan musuh bebuyutan Arab Saudi, sehingga memaksa Arab Saudi harus melakukan blokade terhadap Qatar disebabkan oleh kedekatannya dengan Iran. Menurut penulis, teori ini adalah teori yang paling tepat untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh aktor hubungan internasional, dimana teori ini mempertimbangkan penyebab dibuatnya kebijakan tersebut melalui dua level, yaitu level nasional dan internasional.

KEBIJAKAN BLOKADE ARAB SAUDI TERHADAP QATAR

Krisis diplomatik Qatar 2017 tidak berhenti pada pemutusan diplomatik yang dilakukan oleh ArabSaudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir terhadap Qatar. Lebih dari itu, ArabSaudi dan beberapa negara Teluk tersebut juga menambahkan penderitaan terhadap Qatar dengan mengeluarkan kebijakan blokade terhadapnya. Kebijakan blokade tersebut merupakan salah satu bentuk nyata dari gejolak perpolitikan yang kerap kali terjadi di Timur Tengah, Abdullah Baabood, seorang guru besar di bidang studi politik Teluk mengatakan, bahwa gejolak politik yang terjadi di Timur Tengah merupakan ciri khas yang ada pada kawasan tersebut, dengan besarnya gejolak politik yang terjadi, tidak mengherankan jika negara-negara di Timur Tengah termasuk negara-negara Teluk itu sendiri selalu berupaya untuk menguatkan pertahanan mereka dari ancaman-ancaman politik, ekonomi dan sosial yang mungkin akan terus meningkat sewaktu-waktu, tidak terkecuali Qatar, kebijakan blokade yang dilakukan oleh ArabSaudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir terhadap dirinya saat ini adalah contoh nyata dari gejolak politik yang menimpa negara tersebut sekaligus ujian bagi Qatar untuk bisa bertahan dalam keadaan yang dihadapinya (Baabood, 2017).

Kebijakan tersebut dikeluarkan tepat setelah mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni 2017 silam. Adapun maksud dari kebijakan blokade yang diterapkan oleh ArabSaudi dan beberapa negara Teluk

tersebut berupa larangan bagi warga Qatar untuk berpergian ke negara mereka. ArabSaudi bersama dengan UEA dan Bahrain memboikot seluruh jalur transportasi yang menghubungkan antara Qatar dan negara-negara Teluk tersebut baik melalui jalur darat, laut, serta udara (Jahsan, 2018). ArabSaudi dan beberapa negaraTeluk lainnya yang melakukan blokade terhadap Qatar menganggap bahwa Qatar merupakan negara semenanjung yang menjadi sponsor bagi kelompok-kelompok teroris, mereka juga menambahkan bahwa Qatar telah melakukan pengkhianatan terhadap negara-negara anggota *Gulf Cooperation Council (GCC)*, hal tersebut disebabkan oleh kedekatan Qatar dengan Iran yang mereka anggap sebagai ancaman bagi stabilitas keamanan negara-negara Teluk (Harb, 2018).

Hingga saat ini, penerapan blokade yang dilakukan oleh ArabSaudi dan beberapa negara Teluk lainnya terhadap Qatar masih terus berlanjut, hal ini tentunya sangat merugikan Qatar dari berbagai aspek yang diantaranya adalah politik, ekonomi, bidang transportasi dan akomodasi dan kemanusiaan. Situasi yang semakin rumit ini kemudian menuai tanggapan dari berbagai pihak yang ingin turut andil dalam penyelesaian masalah blokade tersebut, beberapa diantaranya mengecam tindakan dari keempat negara tersebut terhadap Qatar dan menganggap bahwa tindakan blokade tersebut telah melampaui batas bahkan telah melanggar Hak Asasi Manusia. Anggapan seperti itu salah satunya datang dari salah satu badan PBB, yaitu *Office Of The United Nations Hight Commissioner For Human Rights (OHCHR)* yang menuliskan dalam laporan mereka bahwa kebijakan blokade yang diberlakukan oleh ArabSaudi dan ketiga negara lainnya dapat berpotensi pada pelanggaran HAM bagi warga Qatar. Tidak hanya itu, OHCHR juga menambahkan dalam laporannya bahwa tindakan yang dilakukan oleh ArabSaudi dan ketiga negara tersebut merupakan hal yang diskriminatif dan tidak memiliki dasar hukum untuk melemahkan perekonomian negara. Laporan PBB juga menilai bahwa blokade yang dilakukan oleh keempat negara tersebut dilakukan secara sepihak, koersif dan sewenang-wenang. Laporan tersebut kemudian menuai kecaman keras dari keempat negara tersebut, mereka menganggap bahwa hasil investigasi yang dilakukan oleh PBB tidaklah benar, tidak akurat serta berdasarkan pada tuduhan yang tidak terbukti. Upaya lainnya

juga datang dari salah satu negara di Timur Tengah Sendiri, negara itu adalah Kuwait yang mencoba untuk menjadi penengah bagi Arab Saudi dan Qatar, Kuwait bekerja sama dengan negara-negara anggota GCC dalam merumuskan perdamaian antara kedua belah pihak, namun sayang hal tersebut dinilai telah gagal, karena hingga saat ini belum ada langkah-langkah menuju resolusi signifikan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Belum lagi, Amerika Serikat mendorong Kuwait untuk melakukan eskalasi perlawanan terhadap Iran. Hal ini jelas menimbulkan ketidaknyamanan tersendiri bagi Kuwait, mengingat sebelumnya, negara itu berupaya untuk netral dari permasalahan yang saat ini terjadi di Timur Tengah (Diwan, 2018). Respon yang sama juga datang dari Oman, dimana negara itu sama sekali tidak ingin terlibat dalam pembelaan terhadap kedua belah pihak. Kenetralan Oman dalam krisis diplomatik yang melibatkan Qatar dan Arab Saudi serta beberapa negara Teluk lainnya bukanlah sebuah niscaya, melainkan sebuah misi untuk menjalankan prinsip kebijakan luar negerinya yang telah tercatat dalam buku kebijakan luar negeri Oman. Kesultanan Oman memang sudah lama menerapkan prinsip kebijakan luar negeri yang independen, serta menjauhi blok-blok politik yang ada di kawasan, hal tersebut dilakukan kesultanan Oman guna menjaga stabilitas hubungan antara Oman dengan negara-negara tetangganya, dan menerapkan prinsip non-intervensi terhadap permasalahan domestik yang ada di negara-negara tetangganya, serta bentuk penghormatan terhadap hukum internasional, konvensi-konvensi, dan aturan-aturan lainnya. Meskipun begitu, Oman tetap menjalin hubungan dengan Qatar dengan baik tanpa terlibat dalam dukungan terhadap pihak manapun dalam krisis diplomatik yang saat ini terjadi. Doha awalnya memang telah mencari rekan-rekan di Muscat untuk menengahi pertikaian yang saat ini sedang terjadi antara Qatar dan Arab Saudi serta beberapa negara anggota GCC lainnya, saat itu, Oman telah disepakati untuk menjadi negara yang menengahi krisis diplomatik tersebut, namun menimbang banyaknya sensitivitas yang ada dalam permasalahan itu, Oman menolak untuk menjadi mediator bagi krisis diplomatik tersebut. Kendati begitu, Oman tetap mendukung adanya mediasi yang saat ini dilakukan oleh Kuwait dan Amerika Serikat dalam rangka untuk menyelesaikan krisis

diplomatik Qatar tersebut (Babood, 2017). Apa yang dilakukan oleh kedua negara tersebut sebenarnya tidak memberikan efek apapun bagi kebijakan blokade yang diterapkan Arab Saudi terhadap Qatar, Belum lagi dengan adanya ungkapan pesimis yang dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Yousof bin Alawi, yang mengatakan bahwa: *The Standoff pitting Bahrain, Saudi Arabia, The Uni Arab Emirates and Egypt against Qatar is not “eligible for solution”*, ia menyampaikan hal tersebut saat memberikan kuliah umum terkait kebijakan luar negeri Oman di Muscat (Toumi, 2019).

DAMPAK-DAMPAK KEBIJAKAN BLOKADE ARAB SAUDI TERHADAP QATAR

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan blokade yang diterapkan Arab Saudi terhadap Qatar telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi negara tersebut, baik dampak tersebut bersifat negatif ataupun positif. Dampak-dampak dari blokade itu terbagi ke dalam beberapa sektor yang antara lain adalah; dampak di bidang politik, dampak di bidang ekonomi, dampak di bidang transportasi dan akomodasi, serta dampak di bidang kemanusiaan.

1. Dampak Di Bidang Politik

Adapun dampak dari kebijakan blokade yang diterapkan Arab Saudi terhadap Qatar dalam bidang politik dapat dilihat dari beberapa negara lainnya yang sebelumnya menjalin hubungan diplomatik dan kerja sama dengan Qatar secara tiba-tiba memutuskan untuk mengikuti jejak Arab Saudi dalam pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar. Negara-negara tersebut antara lain adalah Uni Emirat Arab dan Bahrain dan Mesir (Dennis, 2018). Tidak hanya itu, dua negara Arab lainnya yaitu Yaman dan Libya juga sepakat untuk memutus hubungan diplomatik dengan Qatar, selain itu terdapat satu negara diluar negara Arab yang juga mengambil keputusan untuk memutus hubungan diplomatik dengan Qatar, negara tersebut adalah Maladewa (Wadrianto, 2017). Dampak politik lainnya yang menimpa Qatar adalah dalam bentuk klaim, dimana negara-negara yang melakukan blokade terhadap Qatar mendasarkan tindakan mereka pada ulah Qatar sendiri yang cenderung berpihak pada *Ikhwanul Muslimin* dimana Arab Saudi dan

kawan-kawannya menganggap bahwa *Ikhwanul Muslimin* adalah organisasi teroris (Knell, 2018), hal tersebut secara tidak langsung menimbulkan *stereotype* dalam dunia internasional bahwa Qatar adalah negara yang mendukung organisasi teroris.

2. Dampak Di Bidang Ekonomi

Berbicara mengenai dampak dari kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar dalam bidang ekonomi sebenarnya tidak seburuk seperti yang dibayangkan. Kendati di awal-awal penerapan blokade tersebut, Qatar mengalami indeks penurunan saham hingga pada titik merah. Pada 4 Juni 2017, indeks saham Qatar yang diukur melalui QE (*Quantitative Easing*) ditutup dengan angka 9.923,6. Sedangkan hari berikutnya tepat dimana Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya melakukan blokade terhadap Qatar, angka tersebut anjlok ke angka 9.151. Tidak hanya itu, saham yang ada di semua sektor ketika itu anjlok seketika, namun yang paling parah adalah saham *real estate* dengan penurunan nilai yang mencapai 9,9 persen pada pukul 16.52 WIB. Selain itu tidak ada sektor yang penurunan sahamnya lebih rendah dari 5 persen (Zuhra, 2017). Seiring berjalannya waktu, ekonomi Qatar akhirnya kembali membaik, hal tersebut sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Ayham Kamel, ketua *Middle East News Agency* bahwa Qatar tidak benar-benar sedang terisolasi dalam dunia internasional saat ini, itulah pentingnya cadangan gas dan juga ekspor gas yang dilakukan oleh Qatar sebagai lumbung uang baginya. Melalui kekayaan serta dana yang dimiliki negara, Qatar hingga saat ini dalam perekonomian yang sehat (Al-Jazeera, 2018). Hal itu dapat dilihat dari persiapan Qatar dalam rangka menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022, dimana mereka dengan cepat mengimpor bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan dari China dan Malaysia setelah pemberlakuan blokade terhadap dirinya oleh Arab Saudi yang bermula sejak 5 Juni 2017 silam (FT, 2018). Namun jika berbicara dari segi efektifitas kerja sama ekonomi yang dibangun oleh Qatar dilihat dari sebelum krisis diplomatik terjadi, tentunya terdapat perbedaan yang cukup signifikan, mengingat, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab merupakan tetangga terdekat Qatar yang selalu mengirimkan

pasokan makanan ke Qatar karena faktor kedekatan geografis. Lebih dari itu, kerja sama antara Qatar, ArabSaudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain juga memiliki persentase tertinggi, yaitu sebesar 86 persen dari total kerja sama dagang dengan negara-negara Arab (Muliana, 2017).

3. Dampak Di Bidang Akomodasi Dan Transportasi

Adapun dampak dari kebijakan blokade ArabSaudi terhadap Qatar di bidang akomodasi dan transportasi dapat dilihat dari penutupan akses untuk menuju ArabSaudi dan ketiga negara Teluk lainnya melalui jalur tanah, udara dan juga laut (عربي, 2019). Kebijakan ini jelas sangat merugikan masyarakat Qatar yang ingin melakukan perjalanan keluar negeri, terutama bagi masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji, mereka harus terhalangi dengan adanya pembatasan terhadap jalur-jalur transportasi tersebut.

4. Dampak Di Bidang Kemanusiaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan blokade yang diterapkan ArabSaudi dan ketiga negara Teluk lainnya terhadap Qatar telah mencederai HAM di kawasan Timur Tengah. Sejak kebijakan blokade tersebut diterapkan, setiap warga Qatar yang tinggal di negara ArabSaudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir harus meninggalkan negara tersebut dalam jangka waktu 14 hari, sedangkan mereka yang tinggal di negara-negara tersebut telah banyak yang menikah dengan orang ArabSaudi dan ketiga negara lainnya dan telah memiliki anak, namun mereka tetap dipaksa untuk meninggalkan negara-negara tersebut dan berpisah dengan keluarganya, hal serupa juga berlaku bagi warga negara ArabSaudi dan warga ketiga negara tersebut yang tinggal di Qatar, mereka diminta untuk kembali ke negara mereka dalam jangka waktu 14 hari, dan hasilnya perceraian antara warga ArabSaudi yang menikah dengan warga Qatar pun semakin banyak (حسني, 2017). Sebagai contoh adalah Fathimah, dia merupakan warga Saudi asli yang menikah dengan warga Qatar dan telah memiliki 4 orang anak, ia mengatakan bahwa situasi ini semakin memperkeruh suasana, dan mempersulitnya untuk menjalin hubungan kerabat-kerabatnya di

Qatar, karena blokade telah memaksanya untuk menarik diri dari media sosial (الجهني, 2018). Selain itu, penerapan blokade terhadap wilayah perairan, darat dan udara yang menghubungkan antara Qatar dan ArabSaudi juga sangat mengganggu rutinitas masyarakat Qatar, terutama bagi masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji ke Mekkah, hal itu menjadi sangat sulit untuk dilakukan lantaran adanya hambatan dari jalur udara oleh pemerintah ArabSaudi terhadap Qatar, selain itu, satu-satunya jalur masuk melalui pos perbatasan yang menghubungkan Qatar dan ArabSaudi melalui jalur darat juga telah ditutup selama dua tahun (Perdana, 2019). Pembatasan tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak, salah satunya adalah dari *Al-Quds Al-Arabi*, komite menuding ArabSaudi telah melanggar rambu-rambu syari'ah serta hukum internasional, komite menjelaskan bahwa pelarangan dan pembatasan tersebut bertentangan dengan rukun Islam yang kelima, yang isinya adalah mewajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk melakukan ibadah haji sekali seumur hidup (Aminuddin, 2018). Tuduhan terkait larangan bagi warga Qatar untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah tidak hanya tertuju pada ArabSaudi, tuduhan serupa juga tertuju pada negara Qatar itu sendiri, yang diduga kuat disebabkan oleh krisis diplomatik yang terjadi di Qatar saat ini, namun pemerintah Qatar sendiri telah membantah tuduhan tersebut melalui QNA (*Qatar News Agency*), otoritas Qatar di kementrian Urusan agama juga menafikkan tuduhan tersebut pada 1 Agustus 2018, ia mengatakan bahwa pemerintah Qatar sama sekali tidak melarang warganya untuk menunaikan ibadah haji, hanya saja mereka hanya menyesalkan oknum-oknum yang menjadikan momen haji sebagai tujuan politik semata (Augesti, 2018).

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN ARAB SAUDI MELAKUKAN BLOKADE TERHADAP QATAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF TWO LEVEL GAME THEORY

Pada bagian ini, penulis akan mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Arab Saudi memberlakukan kebijakan blokade terhadap Qatar ditinjau dari sudut pandang *Two Level Game Theory*. Sebelumnya penulis akan

mengulas kembali terkait definisi dari perspektif *Two Level Game Theory* itu sendiri.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa *Two Level Game Theory* merupakan salah satu teori dalam ilmu hubungan internasional yang digagas oleh Robert D. Putnam. Teori ini berfungsi untuk menganalisis para aktor hubungan internasional dalam membuat sebuah kebijakan. Adapun definisi dari teori ini adalah metafora untuk interaksi tingkat domestik dan internasional. Teori ini beranggapan bahwa, dalam membuat sebuah kebijakan seorang aktor harus memperhatikan dua level utama yaitu level nasional dan level internasional. Pada level nasional, kelompok domestik akan menekan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan mereka, lalu politisi akan melihat hal ini sebagai peluang untuk mencari kekuatan dengan membangun koalisi bersama kelompok-kelompok tersebut. Sedangkan pada level internasional, pemerintah akan berupaya untuk memaksimalkan kemampuan mereka dalam rangka untuk memenuhi kepentingan domestik, sambil meminimalisir konsekuensi yang merugikan pihak asing. Kedua hal ini akan selalu menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan oleh aktor negara dan aktor hubungan internasional, tidak satupun diantara keduanya dapat diabaikan oleh pembuat kebijakan selama suatu negaraitu masih berada dalam ketergantungan atas negara lain (Putnam, 1988).

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua level yang ada dalam *Two Level Game Theory* untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Arab Saudi memberlakukan kebijakan blokade terhadap Qatar. Pada Level pertama adalah memperhatikan bagaimana keadaan domestik di Arab Saudi yang membuatnya harus mengeluarkan kebijakan tersebut, pada level ini faktor domestik Arab Saudi yang dalam hal ini adalah Kerajaan Arab Saudi menjadi faktor utama yang mendorong negara itu untuk membuat kebijakan blokade terhadap Qatar. Sedangkan level kedua adalah memperhatikan bagaimana keadaan di lingkup internasionalnya, lebih tepatnya di kawasan Timur Tengah yang memancing pemerintah Arab Saudi untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Pada level ini, faktor yang paling menentukan adalah aktor-aktor internasional di

kawasan Timur Tengah yang kemudian mendorong Arab Saudi untuk mengeluarkan kebijakan blokade tersebut, salah satu contoh ringkas adalah hubungan antara Qatar dengan Iran yang notabene merupakan musuh bebuyutan Arab Saudi, sehingga memaksa Arab Saudi harus melakukan blokade terhadap Qatar disebabkan oleh kedekatannya dengan Iran.

a. Level Nasional

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pada level nasional dalam teori *Two Level game*, menerangkan bahwa kelompok-kelompok domestik memiliki peranan penting dalam mendorong aktor pemangku kebijakan yang dalam hal ini adalah pemerintah untuk mengeluarkan atau membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan kelompok-kelompok tersebut, politisi yang menyaksikan hal ini tentu menganggapnya sebagai peluang bagi mereka untuk menambah kekuatan dengan cara menjalin koalisi bersama kelompok-kelompok tersebut. Berbicara mengenai faktor di level nasional atau lebih tepatnya faktor domestik yang menyebabkan Arab Saudi memberlakukan kebijakan blokade terhadap Qatar sebenarnya menjadi sebuah bahasan yang cukup rumit, hal ini tidak lain disebabkan oleh sistem pemerintahan Arab Saudi itu sendiri yang hingga saat ini masih bertahan dengan monarki absolutnya, secara tidak langsung penulis ingin mengatakan bahwa faktor domestik yang menyebabkan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan tersebut kemungkinan besar akan banyak tertuju pada keadaan dalam lingkup Kerajaan Arab Saudi semata, dan akan sangat sulit untuk memperhatikan dorongan yang ada di kalangan masyarakat bawah, karena hal tersebut hampir mustahil terjadi di negara yang menganut sistem monarki absolut seperti Arab Saudi. Dalam cakupan yang lebih luas, level nasional ini juga dapat diterapkan di lingkup kawasan, dimana Arab Saudi berperan penting untuk berkoalisi dengan negara-negara di Timur Tengah yang sepemahaman dengannya untuk sama-sama menerapkan kebijakan yang menguntungkan mereka.

Jika ditinjau dari keadaan internal domestiknya yang dalam hal ini adalah kerajaan Arab Saudi itu sendiri mungkin sangat jarang diketahui bahwa salah satu faktor penyebab Arab Saudi menerapkan blokade terhadap Qatar tersebut adalah

karena faktor dendam sejarah pada tahun 1995 yang telah lama dipendam oleh Kerajaan Arab Saudi, ditambah lagi dengan ambisi dari putra mahkota, pangeran Muhammad bin Salman yang saat ini menjalankan urusan Kerajaan dan berniat untuk mengendalikannya di seluruh wilayah juga memiliki pandangan yang suram terhadap Qatar (بالكحلاء, 2017). Sebagaimana diketahui bahwa hubungan antara Arab Saudi dan Qatar sudah mulai merenggang semenjak tahun 1995, tepatnya ketika pangeran Hamad bin Khalifa Al Thani menggulingkan kekuasaan ayahnya sendiri, Khalifa bin Hamad Al Thani yang saat itu tengah berlibur ke Jenewa, kudeta tersebut ditentang keras oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, pasalnya pangeran Hamad bin Khalifa Al Thani muncul dengan konsep kepemimpinan baru yang cenderung bertentangan dengan arah perpolitikan Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya, berbeda dengan ayahnya, Khalifa bin Hamad Al Thani yang pro terhadap Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya di Timur Tengah (Kristanti, 2017).

Selain mempertimbangkan keadaan yang berlaku di internal domestik atau nasionalnya, Arab Saudi juga melihat peluang yang berlaku di internal kawasan Timur Tengah itu sendiri, dimana Arab Saudi melihat bahwa kebijakan blokade yang dibuat olehnya didukung oleh beberapa negara Arab lainnya, dukungan tersebut dapat dilihat melalui keikutsertaan beberapa negara Arab lainnya dalam penerapan kebijakan blokade terhadap Qatar, adapun negara-negara tersebut antara lain adalah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir (Kucukasci, 2019). Jika disesuaikan dengan teori *Two Level Game*, penulis melihat bahwa Arab Saudi merupakan aktor politis yang berupaya untuk membangun kekuatannya dengan menjalin koalisi bersama negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama dengannya dalam rangka untuk mencapai keuntungan politik di kawasan Timur Tengah. Keuntungan politik yang mungkin akan diterima Arab Saudi dapat berupa klaim bahwa Arab Saudi adalah negara yang paling hegemon di Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk dan di kawasan Timur Tengah.

b. Level Internasional

Selain faktor internal domestik Arab Saudi juga didorong oleh faktor eksternal. Terkait dengan faktor-faktor eksternal, dengan kata lain adalah faktor-

faktor yang berasal dari lingkup internasional tentang pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan blokade ArabSaudi, penulis bermaksud untuk membagi faktor-faktor yang ada pada level internasional tersebut ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama adalah faktor kedekatan antara Qatar dan Iran, dimana akan menjabarkan bagaimana hubungan antara Qatar dan Iran ini berpengaruh pada kebijakan blokade yang diterapkan oleh ArabSaudi terhadap Qatar. Bagian kedua akan membahas mengenai faktor kedekatan Qatar dengan organisasi *Ikhwanul Muslimin*, dimana hal ini juga merupakan salah satu alasan mengapa ArabSaudi menerapkan kebijakan blokade terhadap Qatar. sedangkan pada bagian ketiga, penulis akan lebih banyak menyoroti terkait bagaimana ArabSaudi menganggapi negara Timur Tengah yang mencoba untuk bersikap netral, dalam artian tidak berada di pihak manapun, baik ArabSaudi maupun Qatar. Negara tersebut adalah Kuwait yang mencoba untuk menjadi penengah atas bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa krisis Teluk, termasuk Arab Saudi dan Qatar.

1. Faktor Hubungan Qatar Dengan Iran

Qatar dan Iran merupakan kedua negara Timur Tengah yang saling bertetangga antara satu dengan yang lainnya, keduanya memiliki sedikit kesamaan alam hal geografi, jumlah populasi penduduk, struktur demografi, sejarah, politik dan juga ideologi. Dengan sekian banyak persamaan tersebut, keduanya digambarkan sebagai negara yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama mereka, dengan memaksakan keadaan pada satu sisi serta strategi dan pilihan kebijakan yang ditentukan oleh pemimpin mereka untuk negara-negara lainnya (Kamrava, 2017). Hubungan antara kedua negara telah terjalin secara baik pada tahun 1995, pada masa itu, Qatar dipimpin oleh pangeran Hamad bin Khalifa Al Thani, yang banyak mengubah pola perpolitikan Qatar pada masa itu. Qatar yang sebelumnya berhubungan baik dengan ArabSaudi ketika masiih dipimpin oleh Khalifa bin Hamad Al Thani, saat itu berubah seketika, pada masa pemerintahan pangeran Hamad bin Khalifa Al Thani. Pada tahun itu, Qatar mulai menjalin hubungan baik dengan Iran melalui kerja sama dalam pengelolaan gas alam cair dari *Reservoir* yang terletak di lepas pantai North Field, yang luasnya setara dengan Qatar (Prastiwi, 2017). Kendati begitu hubungan atara keduanya tidak selalu baik, pada

tahun 2010 hingga tahun 2016, Qatar sempat memberlakukan sanksi internasional terhadap Iran, diwaktu yang bersamaan, pada Januari 2016, tidak hanya itu, Qatar bahkan sempat menarik duta besarnya dari Iran pada february 2016 (Katzman, 2019).

Namun saat ini, hubungan antara kedua negara sudah mulai normal kembali normal, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Hassan Rouhani, Presiden Iran bahwa ia bersedia untuk meningkatkan hubungan baik antara Qatar dan Iran, dan pada 5 juni 2019 lalu emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani didapati sedang bertukar salam Idul Fitri bersama presiden Iran tersebut (Utomo, 2019). Kabar ini tentunya merupakan kabar baik bagi Qatar, namun tidak bagi ArabSaudi, karena salah satu yang menyebabkan putusnya hubungan diplomatik antara ArabSaudi dan Qatar adalah karena kedekatan Qatar dengan Iran, negara yang sangat dimusuhi oleh Arab Saudi. Kedekatan tersebut pulalah yang kemudian memicu ArabSaudi untuk melakukan blokade terhadap Qatar, karena ArabSaudi menilai bahwa Iran adalah ancaman bagi kawasan, dan jika Qatar ingin krisis diplomatik ini segera diselesaikan salah satu tuntutan ArabSaudi adalah menutup misi diplomatik di Taهران dan mengurangi intensitas kedekatan Qatar dengan Iran (Unit, 2017).

Adapun faktor lain yang mungkin bisa jadi pemicu retaknya hubungan antara ArabSaudi dengan Qatar mungkin disebabkan oleh keberpihakan Qatar untuk memilih Iran sebagai partnernya dalam kerja sama ekonomi dibanding ArabSaudi dan negara-negara Teluk lainnya sebagaimana telah tertera diatas, hal ini tentunya menimbulkan kecemburuan bagi ArabSaudi, dan secara tidak langsung memancing negara tersebut untuk berupaya membuktikan eksistensinya di Timur Tengah bahwa ArabSaudi masih sangat bisa untuk membangkitkan perekonomiannya bersama negara-negara Teluk tanpa bantuan Qatar.

2. Faktor Kedekatan Qatar Dengan *Ikhwanul Muslimin*

Kedekatan antara Qatar dan organisasi *Ikhwanul Muslimin* memang sudah tidak diragukan lagi, dari sekian banyak negara di Timur Tengah, hanya Qatar yang terlihat paling membuka diri terhadap organisasi ini, hal itu dibuktikan

dengan banyaknya tokoh-tokoh ternama dari organisasi tersebut yang kemudian diberi suaka politik oleh Qatar dan memperoleh kewarganegaraan dari negara tersebut. Sebut saja, Yusuf Qardhowi; salah satu tokoh *Ikhwanul Muslimin* yang cukup terkemuka di kalangan dunia Islam maupun umum, beliau sangat terkenal dengan pemikirannya yang moderat “*middle path*” atau menggunakan jalan tengah, yaitu pemikiran islam yang tidak terlalu konservatif (*salafi*), namun tidak juga terlalu bebas, atau menerima sepenuhnya pemikiran Barat yang liberal (Jonston, 2014). Sekalipun Qordhowi adalah orang yang namanya cukup terkemuka di Qatar, disebabkan oleh kecerdasannya dalam bidang ilmu Fiqh, dimana beliau juga merupakan seorang pendiri *Faculty Of Shari’a* di Qatar *University* pada tahun 1961, namun beliau bukanlah satu-satunya tokoh *Ikhwanul Muslimin* yang terkenal di Qatar, terdapat beberapa tokoh *Ikhwanul Muslimin* lainnya yang juga menduduki posisi-posisi strategis di Qatar, yang mayoritasnya terpusat pada sektor pendidikan. Adapun tokoh-tokoh tersebut antara lain adalah Abdul Badi Saqr yang juga berasal dari Mesir dan pindah ke Qatar pada tahun 1954, beliau pernah menjabat sebagai direktur bidang pendidikan di Qatar dan juga pernah menjadi kepala perpustakaan nasional Qatar, selain itu terdapat juga tokoh *Ikhwanul Muslimin* yang merupakan utusan langsung dari Hassan Al-Banna untuk pergi ke Palestina pada tahun 1946, beliau bernama Abdel Muaz Al Sattar. Beliau pernah menjabat sebagai inspektur sekolah di Qatar, kemudian pernah menjabat sebagai kepala sekolah dalam ilmu Islam dibawah kementerian pendidikan Qatar (Roberts, 2014). *Ikhwanul Muslimin* merupakan sebuah organisasi yang dilabeli teroris oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir, hal ini salah satunya disebabkan oleh sejarah dari *Ikhwanul Muslimin* yang dikecam oleh Arab Saudi, dimana mereka pernah melakukan pembunuhan terhadap perdana menteri Mesir dan wakilnya, Maher Pasha dan Mahmud fahmi An-naqrasy sebelum aksi demo yang terjadi pada tahun 1954 (اسامة, 2010).

Dengan adanya sejarah tersebut, rasanya sangat wajar jika Arab Saudi dan Mesir sangat membenci *Ikhwanul Muslimin*, karena Arab Saudi menganggap bahwa organisasi tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi kawasan, persepsi tersebut kemudian diimplementasikan dengan melakukan blokade terhadap Qatar,

karena kedekatannya dengan *Ikhwanul Muslimin*. Secara tidak langsung kedekatan antara Qatar dan *Ikhwanul Muslimin* telah memancing Arab Saudi untuk melakukan blokade terhadap Qatar. adapun hal lainnya yang membuat kemarahan Arab Saudi kepada Qatar semakin memuncak adalah keterlibatan Qatar dalam melakukan pendanaan terhadap *Ikhwanul Muslimin*, hal tersebut dibuktikan dalam sebuah buku yang ditulis oleh dua jurnalis Perancis yang bernama Georges Malbrunot dan Christian Chesnot menggambarkan bahwa Qatar telah menggelontorkan dana yang besar untuk proyek *Ikhwanul Muslimin* di seluruh Eropa, pada halaman pengantar buku tersebut, terdapat dokumen-dokumen rincian pendanaan dari puluhan masjid dan masyarakat Islam untuk mempromosikan *Ikhwanul Muslimin* di Perancis dan Swiss (Fadhilah, 2019). Relevansinya dengan teori *Two Level Game* adalah, bahwa Arab Saudi melihat adanya gejolak atau tekanan yang ditimbulkan oleh organisasi *Ikhwanul Muslimin* di Timur Tengah, dan Qatar telah terpengaruh akan hal tersebut, khawatir akan kemungkinan bertambahnya negara yang menerima organisasi tersebut, akhirnya Arab Saudi harus menentukan sikap dengan melakukan blokade terhadap Qatar atas keberpihakannya terhadap organisasi tersebut.

PENUTUP

Arab Saudi memberlakukan kebijakan blokade terhadap Qatar tepat setelah negara itu memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni 2017. Adapun bentuk dari blokade tersebut berupa boikot terhadap segala sektor yang menghubungkan Arab Saudi dengan Qatar, baik sektor darat, laut maupun udara. Seperti halnya pemutusan hubungan diplomatik, kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar tersebut juga diikuti oleh ketiga negara Teluk diatas, dimana mereka juga menerapkan hal yang sama terhadap Qatar persis seperti apa yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadapnya. Sebenarnya keempat negara tersebut telah bersedia untuk mengakhiri krisis diplomatik yang terjadi, hanya saja hal itu bisa dilakukan jika Qatar sanggup memenuhi 13 tuntutan yang mereka ajukan kepadanya, yang beberapa diantaranya adalah menghentikan aliran dana terhadap organisasi teroris, mengakhiri hubungan dengan *Ikhwanul Muslimin* dan

meminimalisir hubungan diplomatik dengan Iran. Qatar lantas menolak secara keras tuntutan tersebut, terutama tuntutan yang berisikan tentang menghentikan aliran dana kepada organisasi terorisme, pemerintah Qatar menganggap tuntutan tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak bisa diterima. Akhirnya Qatar harus menerima dampak dari kebijakan blokade yang diterapkan oleh Arab Saudi tersebut. Diantaranya adalah dalam bidang politik, akomodasi dan transportasi serta kemanusiaan.

Dampak pada sektor politik dapat dilihat dari keikutsertaan beberapa negara-negara Teluk dan Arab terhadap Arab Saudi dalam memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar, sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat 5 negara Arab yang mengikuti Arab Saudi untuk memutuskan hubungan diplomatik mereka dengan Qatar, dua diantaranya adalah negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk atau GCC, yaitu Uni Emirat Arab dan Bahrain, sedangkan tiga lainnya adalah Yaman, Libya dan Mesir. Selain itu, klaim negara tersebut terhadap Qatar sebagai negara yang mendanai organisasi teroris juga menimbulkan *stereotype* yang buruk bagi Qatar dalam dunia internasional. Dampak yang selanjutnya adalah pada bidang transportasi dan akomodasi, dimana pada bidang ini, masyarakat Qatar dibatasi mobilitasnya untuk melakukan perjalanan ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain melalui sektor darat, laut dan udara, hal ini jelas sangat merugikan masyarakat Qatar, mengingat sebagian besar masyarakat Qatar adalah muslim, dan secara otomatis akan sangat sulit bagi mereka untuk menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji disebabkan oleh adanya blokade tersebut. Dampak yang terakhir dapat dilihat pada sektor kemanusiaan, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pembahasan bahwa OHCHR sendiri telah mengindikasikan adanya pelanggaran HAM yang terjadi terhadap warga Qatar akibat adanya kebijakan blokade tersebut, diantaranya adalah pembatasan terhadap kebebasan, dimana warga Qatar dilarang untuk melakukan perjalanan ke Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab, lalu pemisahan antara sanak keluarga dan kerabat, dimana setelah diberlakukannya kebijakan blokade tersebut, Arab Saudi dan kedua negara Teluk diatas mengharuskan bagi warga Qatar yang tinggal di negara mereka agar meninggalkan negara-negara tersebut dalam jangka waktu

14 hari, hal itu jelas merugikan warga Qatar, terlebih bagi mereka yang telah melakukan pernikahan campuran. Dampak kemanusiaan ini tidak hanya berlaku bagi warga Qatar saja, beberapa warga Saudi juga terkena imbas dari kebijakan blokade yang diterapkan oleh negaranya tersebut. Sebagaimana telah dicontohkan pada bagian pembahasan dimana terdapat seorang wanita Saudi bernama Fatimah yang menikah dengan laki-laki Qatar dan telah memiliki 4 orang anak dengan terpaksa harus berpisah dengan suaminya disebabkan oleh kebijakan blokade tersebut. Jika ditinjau dari *Two Level Game Theory* faktor-faktor yang menyebabkan Arab Saudi memberlakukan kebijakan blokade terhadap Qatar dapat dilihat dari level nasional dan level internasionalnya. Pada level nasional Arab Saudi didorong oleh keadaan domestiknya yang dalam hal ini adalah internal kerajaan Arab Saudi itu sendiri yang memiliki dendam lama terhadap Qatar. Sedangkan pada level internasional, dapat dilihat dari kedekatan Qatar dengan Iran dan *Ikhwanul Muslimin* dimana keduanya merupakan musuh besar bagi Arab Saudi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazeera. (2018). *GCC crisis, one year on: What's the impact on Gulf economies?* Doha: <https://www.aljazeera.com>.
- minuddin, C. (2018). *Jemaah Qatar dan Suriah Dilarang Haji, Arab Saudi Dikecam*. Jakarta: <https://dunia.tempo.co>.
- Augesti, A. (2018). *Dituduh Larang Warganya Laksanakan Ibadah Haji, Ini Kata Pemerintah Qatar*. Doha: <https://www.liputan6.com>.
- Baabood, A. (2017). Qatar's Resilience Strategy and Implications for State-Society Relations. *Intituto Affari Internazionali*, 2.
- Babood, A. (2017). Oman and the Gulf Diplomatic Crisis. *30 Gulf Affairs*, 1.
- Cahyani, S. B. (2019). Faktor-Faktor Manuver Politik Qatar dalam Penguatan Aliansi dengan Iran. *Journal of International Relations*, 519.
- Cherkaoui, T. (2014). Al Jazeera's Changing Editorial Perspectives and the Saudi-Qatari. *The Political Economy of Communication*, 18.
- Dennis, E. E. (2018). International Coverage Of Qatar During Blockade. *Northwestern University in Qatar*, 2.
- Diwan, K. S. (2018). Kuwait: Finding Balance in a Maximalist Gulf. *www.agsiw.org*, 2.
- Fadhilah, U. N. (2019). *Buku Baru Ungkap Skandal Qatar, Ikhwanul Muslimin, dan Tariq*. London: <https://internasional.republika.co.id>.

- FT. (2018). *Meski Krisis, Qatar Pacu Persiapan Piala Dunia 2022*. Jakarta: <https://www.voaindonesia.com>.
- Harb, I. K. (2018). MEASURES OF STALEMATE IN THE GCC CRISIS. *Arab Center Washington DC*, 13.
- Jahsan, K. E. (2018). The GCC Crisis at One Year. *Arab Center Washington DC*, 7.
- Jonston, D. L. (2014). Yusuf Qordhowi's Purposive Fiqh: Promoting Or Demoting Role Of The Ulama? *Palgrave Macmillan*, 39.
- Kamrava, M. (2017). Iran-Qatar Relations. *Palgrave Macmillan*, 167.
- Katzman, K. (2019). Qatar: Governance, Security, and U.S. Policy. <https://crsreports.congress.gov>, 9.
- Kinninmont, J. (2019). The Gulf Divided The Impact of the Qatar Crisis. *Chatham House*, 5.
- Knell, Y. (2018). *Setahun diboikot oleh negara-negara Teluk, Qatar 'tidak juga tumbang'*. Doha: <https://www.bbc.com>.
- Kristanti, E. Y. (2017). *26-06-1995: Kudeta Tak Berdarah Gulingkan Emir Qatar Pro-Saudi*. Doha: <https://www.liputan6.com>.
- Kucukasci, E. S. (2019). *The Saudi-led blockade won't end anytime soon but Qatar has moved on*. Istanbul: <https://www.trtworld.com>.
- Muliana, V. A. (2017). *Saudi Cs Putuskan Hubungan Diplomatik, Ekonomi Qatar Terguncang*. Jakarta: <https://www.liputan6.com>.
- Perdana, A. V. (2019). *Qatar Desak Arab Saudi Cabut Pembatasan Haji bagi Warganya*. Doha: <https://internasional.kompas.com>.
- Prastiwi, A. M. (2017). *Akar Permusuhan Arab Saudi dan Qatar Ada Sejak 22 Tahun Lalu*. Doha: <https://www.liputan6.com>.
- Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games. *Jstor*, 434.
- Roberts, D. B. (2014). Qatar and the Brotherhood. <http://www.tandfonline>, 25-26
- Toumi, H. (2019). *Oman: No solution in sight for Qatar crisis*. Manama: <https://gulfnews.com>.
- Unit, A. R. (2017). Saudi, UAE Demands to End Qatar Crisis: Commands, Diktats, and Ultimatums. *Arab Center Washington DC*, 29.
- Utomo, H. F. (2019). *Iran Sambut Peningkatan Hubungan Baik dengan Qatar di Tengah Konflik Teluk*. Taheran: <https://www.liputan6.com>.
- Wadrianto, G. K. (2017). *7 Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik, Ada Apa dengan Qatar?* Doha: <https://internasional.kompas.com>.
- Wardoyo, B. (2018). Rivalitas Saudi-Qatar dan Skenario Krisis Teluk. *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL*, 82-83.
- Widodo, R. I. (2019). *Qatar, Sang Juara di Antara Kepungan Blokade Negara Arab*. Abu Dhabi: <https://www.republika.co.id>.
- Zuhra, W. U. (2017). *Imbas Ekonomi Putusnya Hubungan Diplomatik Saudi-Qatar*. Doha: <https://tirto.id/imb-ekonomi>.
- اسامة, (2010). At-Taarikh Al Aswad Liikhwaanil Muslimin. www.elyasi.com, 13.
- الجيني, ن. ا. (2018). الأسرة على القطري الحصار آثار. *Qatar Foundation*, 20.

- الدوحة. السعودية العربية المملكة فيه وقعت فخ. قطر حصار. (2017). ج. ع. بالكحلاء
<https://arabi21.com>.
- Doha: عالمية "صدمة" تحدث قطر لمقاطعة الإنسانية الآثار. (2017). ي. حسني
<https://alkhaleejonline.net>.
- Doha: تحقق؟ الذي ما قطر مقاطعة على عامين مرور بعد. (2019). B. عربي
<https://www.bbc.com>.